

BAB II

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH RENDAH

A. Pendidikan Guru Sekolah Rendah di Indonesia Hingga Tahun 1950

Sejak awal kemerdekaan pemerintah telah mengolah dan merumuskan masalah pendidikan dan mencoba bentuk yang sesuai dengan keadaan sosial-ekonomi Indonesia. Aspek pendidikan dengan segala permasalahannya ternyata lebih rumit keadaannya, sehingga mengundang berbagai persoalan yang perlu segera ditangani. Dalam kenyataannya, usaha perbaikan dan pendidikan tersebut tidak semata-mata diatur oleh pemerintah, tetapi masyarakat ikut andil.

Periode 1945-1949 merupakan periode yang sangat singkat dan penuh gejolak dalam kehidupan Republik Indonesia. Sejak kelahirannya secara *de facto* pada 17 Agustus 1945 sampai diperolehnya pengakuan kedaulatan secara *de jure* pada 29 Desember 1949 Republik Indonesia terus dilanda krisis. Pemerintahan Hindia Belanda yang ada dalam pelarian di Australia berusaha menguasai Indonesia kembali dengan “membonceng” pada Tentara Inggris yang diberi tugas untuk melucuti Tentara Jepang di Indonesia sekaligus menerima penyerahan kembali Indonesia oleh Jepang ke Negara-Negara Sekutu.¹ Dalam situasi politik yang bersifat transisional ini Tentara Belanda berusaha mendapatkan kekuasaan dan kedaulatannya atas Indonesia sebagai koloni Kerajaan Belanda.²

¹ Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 255

² Muchtar Buchori. *Evolusi Pendidikan di Indonesia Dari Kweekschool Sampai ke IKIP: 1852-1998*. (Yogyakarta : Insist Press, 2007) hal. 47

Dalam keadaan seperti itu pada 19 Agustus 1945 Presiden Soekarno membentuk kabinet R.I. yang pertama. Dan dalam kabinet ini Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.³ Kabinet ini merupakan Kabinet Presidensial, artinya kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Kebijakan pendidikan pada tahun 1945-1950 belum dirasakan hasilnya sesuai dengan harapan, karena faktor-faktor sosial, ekonomi, dan terutama politik. Namun demikian pemerintah tidak berhenti berupaya menangani perbaikan. Usaha-usaha perbaikan tersebut merupakan usaha untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik daripada masa lalu. Adapun usaha-usaha nyata yang dilakukan pemerintah dalam periode 1945-1950 terutama ditunjukkan pada kebutuhan utama berkenaan dengan bangunan sekolah, tenaga guru, kurikulum dan sistem kerja. Berkaitan dengan keperluan bangunan sekolah yang rusak akibat dari revolusi fisik.

Masalah-masalah pokok yang dihadapi Kementrian P.P. dan K untuk membawa rakyat Indonesia kepada suatu tingkatan kecerdasan ialah kegiatan dalam lapangan pendidikan dalam sekolah, pendidikan luar sekolah, serta usaha-usaha dalam lapangan kebudayaan. Tugas dan pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan yang oleh pemerintah dilaksanakan serta diserahkan kepada Kementrian P.P. dan K. Ketentuan pendidikan umum dari Kementrian P.P. dan K didasarkan atas jiwa dari pasal-pasal UUD 1945. Landasan hukum

³Selanjutnya akan ditulis Menteri P.P. dan K

untuk melaksanakan pendidikan itu yakni; Pertama, UUD 1945 pasal 31⁴ tentang pendidikan. Kedua, UU no. 4 Tahun 1950 yang telah disahkan oleh pemerintah menjadi UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran. UU no. 4 Tahun 1950 mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Tujuan, sistem persekolahan, bahasa pengantar, peserta didik, tenaga pengajar, liburan sekolah dan kewajiban belajar termasuk diatur di dalam UU tersebut. Sudah barang tentu segalanya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pokok.

Guru merupakan salah satu komponen yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses pendidikan di samping gedung sekolah dan murid. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan di segala bidang yang seluas-luasnya untuk mencerdaskan bangsa, maka keperluan akan guru yang memenuhi persyaratan dan mencukupi jumlahnya merupakan keharusan untuk pengadaannya yang ditempuh dengan jalan mengadakan pendidikan guru dan kursus pendidikan guru. Dalam UU no. 4 Tahun 1950 syarat seorang guru telah diatur pada pasal 15⁵ dan pasal 16⁶.

Masalah pokok yang dihadapi pada waktu itu bukanlah bagaimana menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan, tetapi masalah dana dan sarana. Hal ini menyebabkan usaha-usaha pendidikan tidak dapat merata, tetapi

⁴ Pasal 31 ayat 1 "*Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran*", pasal 31 ayat 2 "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*" pasal 31 ayat 3 "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional*".

⁵ UU No. 4 Tahun 1950 Pasal 15 "*Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai keehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberikan pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 undang-undang ini*".

⁶ UU No. 4 Tahun 1950 Pasal 16 "*Di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup*".

menggunakan prioritas. Bidang-bidang yang sangat diperlukan mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Usaha-usaha pendidikan dan pengajaran dari tahun 1951 – 1954 belum memiliki program jangka panjang. Program jangka panjang baru ada sejak tahun 1955.

Dalam laporan yang disusun oleh Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru Bandung⁷ pada tahun 1950 dicantumkan, bahwa pada waktu itu di seluruh Indonesia terdapat dua belas juta anak dari golongan umur 6-12 tahun. Dari jumlah ini yang bersekolah hanya 4,5 juta anak, sedang sisanya, yaitu 7,5 juta anak tidak bersekolah.

Kondisi itu disebabkan gedung sekolah dan jumlah guru masih sangat terbatas. Keterbatasan gedung sekolah tersebut membuat daya serap peserta didik masih kecil. Pada tahun 1940 jumlah sekolah rendah (HIS) berjumlah sekitar 300 sekolah dengan jumlah peserta didik 76.756 siswa dan meningkat dratis pada tahun 1950 dengan jumlah sekolah rakyat yang mencapai 23.801 dengan daya serap peserta didik sebanyak 4.926.370 orang.⁸

Peningkatan jumlah sarana pendidikan seperti gedung juga harus disertai dengan ketersediaan guru untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Untuk mempersiapkan

⁷ Pada tahun 1950 dibentuk Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru (BKTPG), yang tugasnya menyelenggarakan kursus tertulis pendidikan guru. Pendirian BKTPG diberi tugas menyediakan bahan pelajaran untuk kursus-kursus tertulis pendidikan guru. Lihat dalam (<http://arsandip4tk.blogspot.co.id/2013/04/sejarah-pppstk-tk-plb-bandung.html?m=1> diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 19.00)

⁸ Soegarda Poerbakawatja. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung. 1970. hal. 69

guru-guru yang akan mengajar 7,5 juta anak ini, dengan pendidikan guru SD yang ada pada waktu itu akan dibutuhkan waktu 10-20 tahun.

Ditambahkan dalam laporan itu, bahwa ini merupakan gambaran persoalan yang kasar, karena didasarkan atas situasi kependudukan yang statis. Dalam kenyataan, persoalannya lebih rumit lagi, karena jumlah anak-anak dalam golongan umur 6-12 tahun tidak statis, tetapi bertambah terus. Sementara jumlah pertambahan anak-anak dari golongan umur ini tidak dapat dipastikan karena bergantung kepada berbagai faktor demografi dan sosial, seperti tingkat kesehatan penduduk (morbiditas), mortalitas, kesejahteraan ekonomi, dan sebagainya.⁹

Dengan asumsi pada waktu itu, bahwa laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,1% per tahun, diperkirakan bahwa jumlah anak dari golongan umur 6-12 tahun akan terus meningkat, dari 7,5 juta pada tahun 1950. Karena pemerintah Indonesia sudah mengambil keputusan bahwa setiap anak Indonesia antara umur 6-12 tahun harus mendapat kesempatan belajar, maka konsekuensinya ialah, bahwa sekolah-sekolah baru harus didirikan, dan guru-guru untuk sekolah-sekolah baru tadi harus dipersiapkan. Pada tahun 1950 itu pemerintah Indonesia sudah mulai mempersiapkan kewajiban belajar; dan persiapan kewajiban belajar ini direncanakan harus sudah selesai pada tahun 1960.

Untuk keperluan kewajiban belajar ini, Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru memperkirakan, selama 10 tahun mendatang, setiap tahun harus dipersiapkan 50.000 guru baru. Kebutuhan guru baru dalam jumlah sebesar itu tidak mungkin dipenuhi oleh sekolah-sekolah guru yang ada pada waktu itu. Di

⁹ Muchtar Buchori. *op cit.* hal. 86

seluruh Indonesia pada waktu itu hanya terdapat kurang lebih 100 SGB dan 40 SGA, dan kedua lembaga pendidikan guru itu setiap tahun hanya mampu menghasilkan sekitar 1500-2500 orang guru. Kekurangan akan guru sebesar itu tidak mungkin dapat diatasi hanya dengan mendirikan sekolah-sekolah guru yang baru. Faktor penyebabnya adalah karena selain tidak tersedianya cukup dana untuk membangun gedung-gedung sekolah baru dan menyediakan alat-alat pendidikan dalam waktu yang singkat, juga tidak akan dapat ditemukan jumlah guru yang memenuhi persyaratan untuk mengajar di sekolah-sekolah guru yang akan didirikan tadi.¹⁰

Pada tahun 1946 pemerintah membuka 3 sekolah guru yaitu Sekolah Guru A (SGA), Sekolah Guru B (SGB) dan Sekolah Guru C (SGC). Lama pendidikan SGA yaitu 6 tahun setelah Sekolah Rakyat (SR), SGB 4 tahun setelah SR dan SGC adalah 2 tahun setelah SR. SGA bertujuan untuk mencetak tenaga pengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedang SGB dan SGC bertujuan untuk mencetak tenaga pengajar di SR. Siswa yang masuk di SGB adalah lulusan Sekolah Rakyat (SR) kelas VI yang lulus dalam ujian masuk SGB. Peserta didik yang pandai dan tidak mampu mendapat ikatan dinas dari pemerintah. Upaya tersebut guna meringankan beban orangtua maupun peserta didik yang masuk di SGB.

Rencana Kewajiban Belajar

Pada tahun 1954, pemerintah melalui Kementerian P.P. dan K mencanangkan rencana kewajiban Belajar bagi anak-anak di Indonesia. tujuan

¹⁰ *Ibid*, hal.87- 88

dari rencana ini ialah meningkatkan mutu masyarakat Indonesia secara signifikan dalam kurun waktu 10 tahun. Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Jepara menjadi daerah percobaan terhadap rencana kewajiban belajar yang digagas dari tahun 1950-1960. Kemudian Sumedang dan Purworejo bersedia menjadi daerah percobaan kewajiban belajar. Beberapa wilayah tersebut diuji coba untuk mengetahui segala rintangan dan persiapan untuk menyelenggarakan kewajiban belajar tersebut.

Dalam daerah-daerah percobaan tersebut rencana pelajaran dan pendidikan sekolah rakyat sudah disesuaikan dengan keadaan setempat (pertanian, perikanan, dll). Dengan pola yang didapat dalam penyelenggaraan kewajiban belajar di daerah percobaan, pemerintah dapat merencanakan kewajiban belajar sesuai kebutuhan yang sesuai dengan berbagai wilayah di Indonesia.¹¹

Rencana kewajiban belajar ini merupakan proyek raksasa kementerian P.P. dan K. Dalam meningkatkan mutu warga negara Indonesia. sampai tahun 1959 ada beberapa wilayah yang menjadi daerah percobaan seperti : Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi, Kalimantan dan Bali. Rencana ini menelan jumlah biaya yang cukup banyak.

Rencana belajar ini mengalami kegagalan disebabkan karena jumlah guru dan berbagai fasilitas sekolah yang belum optimal. Jumlah guru yang masih sangat terbatas tersebut tidak memberikan gambaran jelas mengenai rencana kewajiban belajar.

¹¹ Soegarda Poerbakawatja, *op cit*, hal. 76

B. Pendidikan Guru Sekolah Rendah

Kursus Pengantar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar

Kekurangan tenaga guru pada awal tahun 1950 membuat masalah yang cukup besar pada dunia pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian P. P. dan K perlu membuat perencanaan yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Setidaknya tidaknya dapat memenuhi kebutuhan guru untuk jangka waktu 10 tahun dan pendidikan guru darurat merupakan solusi dari pemerintah.

Mulai tanggal 1 Agustus 1950 pemerintah menyelenggarakan suatu jenis pendidikan guru darurat, yang dinamakan Kursus Pengantar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPkpKB). Tujuannya adalah mendidik calon-calon guru yang cukup banyak dalam waktu 10 tahun (1950-1960). Karena kondisi Indonesia yang membutuhkan tenaga pengajar dengan jumlah yang sangat banyak pada saat itu. Kursus ini ditempatkan pada SR 6 tahun yang mempunyai paling sedikit 3 orang guru yang berijazah *Normaalschool/Kweekschool*, dan terdiri dari:

1. Dua tahun pendidikan secara lisan dan,
2. Dua tahun pendidikan secara tertulis dengan penjelasan-penjelasan lisan tiap-tiap triwulan, selama 2 minggu.

Pendidikan untuk 2 tahun yang pertama diserahkan kepada guru-guru SR yang berijazah *Normaalschool/Kweekschool* yang terpilih dan untuk 2 tahun berikutnya kepada guru-guru sekolah lanjutan. Kursus ini diakhiri dengan menempuh ujian persamaan SGB.

Syarat masuk: Ijasah Sekolah Rakyat 6 tahun dan lulus ujian masuk ke Sekolah Lanjutan. Uang sekolah tidak dipungut, semua pengikut diharuskan menandatangani perjanjian ikatan dinas. Yang lulus pada ujian setelah mendapatkan kursus dua tahun awal akan diangkat sebagai calon guru pada kursus pengantar kewajiban belajar (KPKB). Para calon guru itu, disamping memberikan pelajaran pada kursus pengantar, diharuskan pula meneruskan pelajarannya 2 tahun lagi, sehingga mereka dapat menempuh ujian persamaan SGB. Setiap kabupaten memiliki dua KPkpKB dengan jumlah murid 80 orang di setiap kursus.

Munculnya KPkpKB mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat. Karena kemampuan mengajar lulusan pendidikan darurat ini diragukan. Hal ini disebabkan karena lama pendidikan yang hanya dua tahun setelah lulus dari SR dianggap terlalu cepat untuk membentuk calon guru. Lalu pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kualitas para lulusan KPkpKB ini melalui kursus tertulis. Untuk keperluan ini, didirikanlah Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru di Bandung. Namun ada permulaan tahun pelajaran 1953-1954 KPkpKB itu dirubah menjadi SGB.¹²

Sebelum KPkpKB dibentuk, kementrian P.P. dan K dengan PGRI telah melakukan kesepakatan tentang Pendidikan Guru Sekolah Rakyat. Kedua pihak sepakat bahwa Guru Sekolah Rakyat mendapatkan pendidikan selama 4 tahun sesudah sekolah rakyat, bahkan selanjutnya harus diusahakan agar guru-guru sekolah rakyat harus memdapatkan pendidikan SGA (selama 6 tahun sesudah SR

¹² Muchtar Buchori. *op cit*, hal. 172

atau 3 tahun sesudah SMP). Mengingat, bahwa di dalam masyarakat terutama masyarakat yang berada di pedesaan guru-guru sekolah rakyat mempunyai tugas pendidikan juga bagi masyarakat sekelilingnya, sehingga guru-guru harus mempunyai pendidikan yang dapat memberi perlengkapan yang cukup untuk keperluan itu..

Meskipun pada awalnya PGRI tidak menyetujui rencana darurat Kementrian P.P. dan K untuk pendidikan guru, tetapi akhirnya pihak PGRI mau menyetujui KPkpKB sebagai rencana darurat. Dengan persetujuan itu maka rencana darurat pendidikan guru ini dapat terlaksana. Karena murid-murid KPkpKB belum memenuhi syarat sebagai guru sekolah rakyat menurut persetujuan Kementrian P.P. dan K dan PGRI. Oleh sebab itu pendidikan ini disebut kursus pengantar.

Ketika KPkpKB muncul jumlah guru bertambah secara signifikan. Namun sangat disayangkan bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah terbentuk dengan wewenang yang diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran rendah dalam arti, bahwa semua biaya dan termasuk gaji guru, biaya gedung, alat-alat dan buku-buku pelajaran dibebankan kepada provinsi, sedangkan pendidikan guru tetap kewenangan Kementrian P.P. dan K.¹³ Keadaan tersebut mengakibatkan pendidikan rendah sangat bergantung kemampuan dan kebijakan provinsi. Akibatnya rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat tidak berjalan semestinya. Selain itu proses birokrasi untuk penempatan guru di Provinsi juga dinilai berbelit. Dan pada akhirnya calon guru

¹³ Soegarda Poerbakawatja, *op cit*, Hal. 169

yang sudah siap mengajar kecewa dan meninggalkan dunia pendidikan. Dengan demikian rencana 10 tahun kewajiban belajar pada tingkat pertama telah mengalami kegagalan. Untuk melanjutkan usaha itu maka hubungan pemerintah pusat dengan provinsi perlu dirumuskan kembali sebagai jaminan kelancarannya.

Sekolah Guru B

Sekolah Guru B (SGB) merupakan pendidikan calon guru SR yang dianggap memenuhi syarat pada tahun 1953. SGB merupakan sekolah menengah kejuruan yang mendidik calon guru untuk memenuhi kebutuhan pengajar di sekolah Rakyat. Lama pendidikannya empat tahun sesudah SR.¹⁴ Perbedaan antara Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Guru B yaitu lulusan SMP dapat menempuh pendidikan di SMA sedangkan untuk lulusan SGB hanya dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru A (SGA) karena SGB merupakan sekolah menengah kejuruan.

Pendidikan SGB terdiri dari SGB Negeri dan SGB Swasta. SGB Swasta terbagi menjadi dua, yaitu: SGB Swasta Bersubsidi dan SGB Swasta non Subsidi. Pendidikan di SGB Negeri tidak dipungut biaya bahkan masih ada uang saku yang diberikan kepada siswa SGB Negeri. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan dinas dari pemerintah sehingga siswa harus bersedia ditempatkan di daerah manapun setelah lulus dari SGB. Sedangkan untuk SGB Swasta baik yang bersubsidi ataupun non subsidi tetap dikenakan biaya.

¹⁴ Suradi HP, dkk. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Dejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986) hal. 59

Perkembangan SGB sangat pesat. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1953/1954 semua KPkpKB yang pada setiap kabupaten berjumlah dua buah diintegrasikan/diubah menjadi SGB. Pada tahun 1954 jumlahnya melonjak dari 170 buah menjadi 483 buah. Kemudian pada tahun 1959 terdapat 539 SGB baik yang negeri dan swasta. Pada tahun 1959 banyak lulusan SGB yang belum dapat diangkat karena kekurangan sekolah SR. Hal ini tentu menjadi masalah, sehingga pada tahun tersebut Kementerian PP dan K, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan mengadakan pertemuan untuk memecahkannya.¹⁵

Pendidikan SGB ditempuh selama empat tahun. Peserta didik yang ingin masuk ke SGB harus mengikuti ujian masuk. Ujian masuk tersebut berupa hasil ujian tulis dari SR yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Menulis, Pengetahuan Umum dan berhitung. Pada dasarnya pelajaran empat tahun tersebut sama dengan tiga tahun pelajaran umum seperti yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), ditambah satu tahun pelajaran kejuruan guru. Pada kelas I sampai dengan kelas III pelajaran umum lebih banyak diberikan, dan pada akhir tahun III diadakan ujian. Bagi anak-anak yang mempunyai nilai amat baik dapat meneruskan ke SGA tanpa harus melanjutkan pendidikan SGB di tahun IV. Pada tahun IV lebih banyak diberikan pendidikan didaktik, metodik, ilmu jiwa dan praktek mengajar.

Kurikulum¹⁶ SGB menggunakan kurikulum SMP ditambah materi kependidikan. Kurikulum yang digunakan di SGB pada tahun 1950-1961

¹⁵ *Ibid.* hal. 60

¹⁶ Kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf

menggunakan Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang merupakan penyempurnaan dari Rencana Pelajaran Tahun 1947. Mata pelajaran yang dipelajari di SGB antara lain Bahasa, Ilmu Pasti dan Ilmu sosial. Bahasa yang dipelajari di adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa. Ilmu pasti yang dipelajari antara lain Ilmu hayat, ilmu alam, ilmu pasti, dan berhitung. Ilmu sosial yang dipelajari adalah Sejarah dan Ilmu Bumi. Selain itu, juga dipelajari Menulis, Menggambar dan Pendidikan Jasmani.¹⁷

Setiap 4 bulan sekali peserta didik akan menerima nilai rapot dari ulangan umum yang dilakukan. Di kelas 3 caturwulan terakhir diadakan ujian penghabisan untuk peserta didik yang akan melanjutkan ke SGA. Mata pelajaran yang diujikan adalah Ilmu Pasti, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi dan Sejarah/Tata Negara. Peserta didik yang tidak melanjutkan di SGA dapat melanjutkan kelas 4 di SGB dengan melaksanakan praktek mengajar.

Praktek mengajar dilaksanakan setelah menerima rapot caturwulan pertama di kelas 4. Setelah itu peserta didik melakukan praktek mengajar selama kurang lebih enam bulan. Praktek mengajar bertujuan untuk melatih peserta didik untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari.

Kurikulum SGB beberapa kali disempurnakan lewat konferensi ahli pendidikan dan kepala-kepala SGB di Salatiga dan Malang. Sebagai kelanjutan perbaikan mutu ini di Tasikmalaya, Sumedang, Salatiga, dan Bangil didirikan

pengajarnya. Lihat Nasution S, *Kurikulum dan Pengajaran*. (Bandung: Bumi Aksara, 2006), hal. 5

¹⁷ Soegarda Poerbakawatja. *op cit*, hal. 180-181

SGB *Pilot Project*. Untuk tempat latihan mengajar para murid kela terakhir SGB didirikan latihan yang dikelola langsung oleh Inspeksi Pendidikan Guru.¹⁸

Pilot Project merupakan usaha pembaharuan pendidikan guru SR, maka pada tahun pelajaran pada tahun 1955/1956. Djawatan Pengadjaran melaksanakan “suatu usaha perintis” dengan menetapkan tiga SGB menjadi *Pilot Project* yaitu SGB-SGB yang berada di Sumedang, Salatiga, dan Bangil. Djawatan Pengadjaran mempunyai rencana agar setiap daerah memiliki *Pilot Project* masing-masing yang dapat menjadi perintis pembaharuan pendidikan guru.¹⁹

Tujuan utama dari usaha itu ialah untuk menghubungkan sekolah dengan masyarakat, sehingga sekolah dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan sebaliknya masyarakat menganggap sekolah sebagai milik bersama yang perlu dijaga dan dipelihara. Dengan adanya *Pilot Project*, murid-murid SGB diajarkan untuk mempelajari kegiatan kerja dan diajarkan untuk bekerja sama dengan masyarakat.

Hasil-hasil dari uji coba tersebut akan diimplementasikan saat mengajar di SR. Dengan demikian maka pendidikan yang ada pada SR mengandung kegiatan –kegiatan yang benar-benar praktis, ekonomis, dan dapat membentuk perilaku siswa dengan benar. Di Jawa Barat, pelaksanaan *Pilot Project* di SR mulai dilaksanakan serentak pada tahun ajaran 1957/1958. Dengan demikian pemerintah bermaksud untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak akan masyarakat desanya. Dengan pengetahuan yang didapat dari sekolah diharapkan mereka akan senang

¹⁸ Suhadi HP, dkk. *op cit.* hal. 60

¹⁹ I Djumhur, Danasuparta. *Buku Peladjaran Sedjarah Pendidikan*. (Bandung: Tjerdas, 1961) hal. 186

ikut serta dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sistem *Pilot Project* di SR ini, anak-anak bukan saja harus mendapatkan pengetahuan dasar, tetapi juga pengetahuan praktis.

Rukun Belajar Kursus Tertulis Persamaan SGB dan Rukun Belajar Kursus Tertulis Persamaan SGA

Rukun Belajar Kursus Tertulis Persamaan SGB (RBB) dan Rukun Belajar Kursus Tertulis Persamaan SGA (RBA) muncul karena Kursus Lisan Persamaan SGB²⁰ dan Kursus Lisan Persamaan SGA²¹ hanya diadakan di kota-kota besar saja, maka tidak dapat diikuti oleh guru-guru didesa-desa. Itulah sebabnya guru-guru SR yang tinggal jauh dari kota dengan belajar sendiri dapat memperluas pengetahuannya dan dengan itu dapat pula memperbaiki nasibnya. Kedua usaha ini diselenggarakan oleh Balai Pendidikan Guru, dengan cara secara berkala mengirimkan pelajaran-pelajaran kepada tiap-tiap Rukun Belajar. Rukun Belajar Kursus Tertulis Persamaan SGB terbagi dalam 4 tingkatan, sedangkan Rukun Belajar Kursus Tertulis Persamaan SGA dalam 2 tingkatan. Rukun belajar dapat didirikan bila pada suatu tempat dapat berkumpul sekurang-kurangnya 15 orang guru (untuk jawa dan madura) atau 5 orang (untuk luar jawa). Tiap-tiap Rukun Belajar dipimpin oleh seorang ketua. Ketualah yang menerima pelajaran-pelajaran

²⁰ Kursus ini dilakukan selama 4 tahun dan diberikan secara lisan pada waktu sore hari. Para pengajar adalah guru-guru yang pada pagi hari mengajar di sekolah lanjutan setempat. Mata pelajaran yang diberikan sama dengan SGB. Lihat I Djumhur, Danasuparta. *Buku Peladjaran Sedjarah Pendidikan*. (Bandung: Tjerdas, 1961) hal. 169

²¹ Kursus ini dilakukan selama 2 tahun dan diberikan secara lisan pada waktu sore hari. Para pengajarnya adalah guru-guru yang pada pagi hari mengajar di sekolah lanjutan setempat. Mata pelajaran yang diberikan sama dengan SGA. Lihat I Djumhur, Danasuparta. *Buku Peladjaran Sedjarah Pendidikan*. (Bandung: Tjerdas, 1961) hal. 169

dari balai pendidikan guru dan berkewajiban untuk memimpin pelajaran teman-temanya, yang diadakan 4 kali dalam seminggu.

RBB dan RBA diakhiri dengan ujian negeri yang diselenggarakan oleh Departemen P dan K untuk mencapai ijazah persamaan SGB dan SGA. Sampai tahun 1952 pengikut RBB harus menempuh ujian untuk mencapai ijazah persamaan SGB sekaligus dalam semua mata pelajaran. Tetapi mulai tahun 1959 ujian diadakan 4 kali berturut-turut. Tiap-tiap akhir tahun pelajaran diujikan 3 mata pelajaran. Ujian-ujian tersebut diadakan pada tiap bulan desember.²²

- Tahun pertama : Ilmu Bumi, Sejarah dan Menggambar
- Tahun kedua : Ilmu Alam, Ilmu Hayat dan Seni Suara
- Tahun ketiga : Bahasa Daerah, Berhitung dan Pendidikan Jasmani
- Tahun keempat : Ilmu Guru dan Bahasa Indonesia

Setelah KLP SGA dihapus dan diganti dengan KGA, maka bagi pengikut RBA terbuka dua jalan untuk dapat memperoleh ijazah SGA negeri:

1. Turut ujian penghabisan SGA negeri sebagai calon luar biasa, bersama-sama dengan murid kelas 3 SGA. Calon harus menempuh ujian sekaligus dalam semua mata pelajaran termasuk praktek mengajar.
2. Turut ujian penghabisan SGA negeri bersama-sama dengan pengikut-pengikut KGA negeri. Calon-calun diperbolehkan menempuh ujian dalam 3 tingkat.

²² *Ibid*, hal. 170-171